

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sebagai bentuk organisasi sektor publik, pemerintah di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang sangat luar biasa baik pemerintah pusat maupun daerah. Kondisi seperti ini menimbulkan tuntutan yang kuat atas akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang buruk dan penyajian yang belum dapat diharapkan secara wajar, salah satu penyebabnya yaitu dari lemahnya Pengendalian Intern.

Sistem Pengendalian Intern sangat penting dalam menunjang perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan merupakan faktor pendukung untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan dari kinerja yang baik. Berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 bahwa yang dimaksud dengan Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

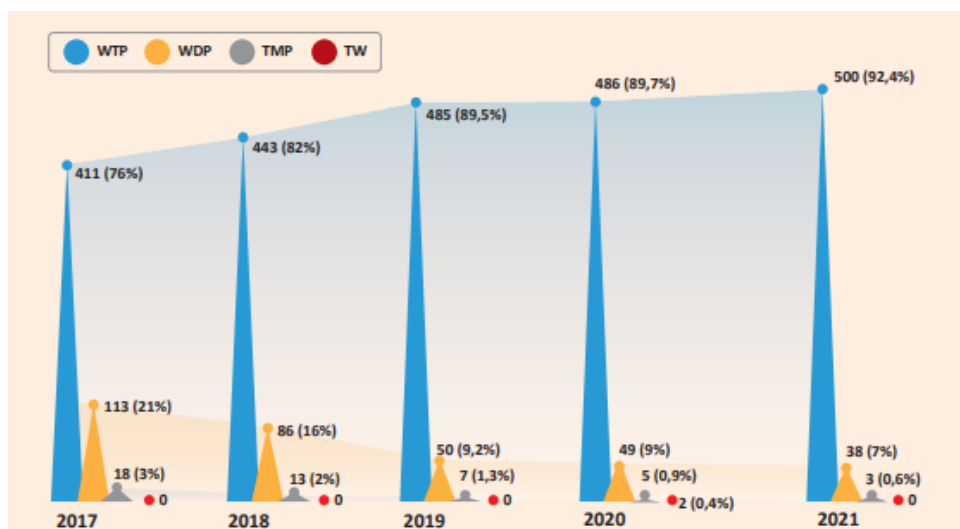
Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan salah satu instrumen dalam pencapaian tujuan bersama (*goal congruence*) Pemerintah Daerah. Keberhasilan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada pengelolaan keuangan SKPD dapat tercermin dalam opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan pada Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penerapan pengendalian intern yang benar dan baik pada suatu pemerintahan akan dapat mencegah terjadinya penggelapan dan risiko kesalahan baik pencatatan maupun perhitungan yang nantinya akan berimbas pada kegagalan dalam pembuatan laporan keuangan dan ketidakakuratan dalam proses penyusunan.

Dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas tentu membutuhkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi - fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam hal ini adanya Kompetensi Sumber Daya Manusia mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya serta memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan.

Setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan merilis laporan atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah. BPK memberikan empat kriteria yang menjadi indikator dari tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, empat kriteria tersebut yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan informasi,

kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern. Dari pemeriksaan tersebut BPK memberikan predikat berupa empat jenis opini berdasarkan tingkat kewajaran informasi. Pertama Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berarti laporan keuangan tersebut terbebas dari salah saji material berdasarkan dari bukti-bukti audit yang dikumpulkan, maka entitas tersebut dianggap telah menyelenggarakan standar akuntansi yang berlaku umum dengan baik, disamping opini WTP terdapat pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), opini ini dikeluarkan apabila dalam keadaan tertentu auditor tersebut harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan auditnya. Kedua opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang berarti sebagian besar informasi dalam laporan keuangan terbebas dari salah saji material, kecuali untuk beberapa item tertentu yang menjadi pengecualian. Ketiga Opini Tidak Wajar (TW) yang berarti laporan keuangan tersebut mengandung salah saji material, apabila auditor memberikan opini tidak wajar maka sudah dipastikan laporan keuangan tersebut diragukan kebenarannya, sehingga berpotensi menyesatkan pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Keempat Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) yang berarti auditor menolak untuk memberikan pendapat dikarenakan ketidakyakinan terhadap laporan keuangan yang disajikan. Penerbitan opini ini didasari oleh anggapan bahwa ruang lingkup auditor dibatasi oleh pihak *auditee* sehingga menyulitkan auditor untuk mengumpulkan dan memperoleh bukti-bukti yang diperlukan (Bpkad.Banjarkab.go.id).



Sumber: IHPS 1 Tahun 2022, www.bpk.co.id

**Gambar 1.1**

**Perkembangan Opini LKPD tahun 2017-2021**

Seperti yang terlihat di Gambar 1.1 didalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) 1 semester I tahun 2022, BPK memeriksa 541 (99%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 dari 542 pemda yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2021. Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2021 meliputi Neraca per 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2021, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 500 (92,4%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 38 LKPD (7%), dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 3 (0,6%) LKPD. Berdasarkan tingkat

pemerintahan, opini WTP dicapai 34 dari 34 pemerintah provinsi (100%), 377 dari 414 pemerintah kabupaten (91%), dan 89 dari 93 pemerintah kota (96%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2020- 2024 masing-masing sebesar 92%, 80%, dan 92% di tahun 2021.

Dalam 5 tahun terakhir (2017-2021), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebesar 16,4 poin persen, yaitu dari 76% pada LKPD Tahun 2017 menjadi 92,4% pada LKPD Tahun 2021. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini WDP mengalami penurunan sebesar 14 poin persen dari 21% pada LKPD Tahun 2017 menjadi 7% pada LKPD Tahun 2021. Berdasarkan tingkat pemerintahan, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kenaikan opini WTP dari tahun 2020. Kenaikan opini pada LKPD Tahun 2021 terjadi pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) dari 33 (97%) menjadi 34 (100%) LKPD, pada pemerintah kabupaten (Pemkab) dari 365 (88%) menjadi 377 (91%) LKPD, serta pada pemerintah kota (Pemkot) dari 88 (95%) menjadi 89 (96%) LKPD. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya kenaikan opini dari opini Tidak Wajar (TW) menjadi opini WDP pada 1 LKPD, dari opini TW menjadi opini WTP pada 1 LKPD, dari opini TMP menjadi opini WDP pada 3 LKPD, dan dari opini WDP menjadi WTP pada 21 LKPD. Kenaikan tersebut terjadi karena pemda telah melakukan perbaikan atas permasalahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga akun-akun dalam

laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP. (IHPS 1 Tahun 2022, [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id))

Berdasarkan LHP Nomor 14A/LHP/XVIII.BDG/05/2022 Pemerintah Kota Tasikmalaya menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021. Opini tersebut merupakan opini WTP yang ke 6 (enam) kali secara berturut-turut yang diraih oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Berikut merupakan Opini BPK atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah Kota Tasikmalaya selama lima tahun:

**Tabel 1.1**

**Daftar Opini untuk LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2021**

No	Tahun	Opini
1.	2017	Wajar Tanpa Pengecualian
2.	2018	Wajar Tanpa Pengecualian
3.	2019	Wajar Tanpa Pengecualian
4.	2020	Wajar Tanpa Pengecualian
5.	2021	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : LHP LKPD Kota Tasikmalaya 2017-2021, IHPS <https://jabar.bpk.go.id/>

Dari informasi tersebut terdapat permasalahan pada pemerintah kota Tasikmalaya diantaranya adalah permasalahan dalam pengadaan barang/jasa yang menimbulkan indikasi pemborosan daerah, permasalahan aset tetap, baik terkait pengelolaan maupun penatausahaannya, permasalahan dalam belanja modal yang menimbulkan kelebihan pembayaran, serta permasalahan terkait penatausahaan pendapatan retribusi yang belum memadai.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap**

## **Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya)”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diatas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya.
2. Bagaimana pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya.
3. Bagaimana pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia secara parsial terhadap

kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya.

3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tasikmalaya.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya terkait dengan kualitas laporan keuangan serta diharapkan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan, menjadi referensi dan konseptual terhadap peneliti yang akan datang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan juga dapat digunakan untuk melatih kemampuan dalam berpikir kritis sekaligus dapat menentukan solusi atas masalah yang akan datang di masa depan.

- b. Bagi Pihak SKPD Kota Tasikmalaya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan kepada pihak SKPD dalam mengembangkan sistem pengendalian intern pemerintah dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan.



c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan penelitian ini dapat memberi sedikit informasi yang sekiranya bisa dimanfaatkan sebagai referensi untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis melaksanakan penelitian ini pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Kota Tasikmalaya.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2023. Adapun rincian waktu penelitian terlampir.